SIDAK ORI SOAL DUGAAN JUAL BELI SERAGAM SMPN 1 DEPOK DIDUGA BOCOR

Senin, 18 Juli 2022 - Fajar Hendy Lesmana

Sleman - Rencana inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) soal jual beli seragam siswa di SMPN 1 Depok, Sleman, diduga bocor. Alhasil ORI DIY gagal mendapati tahap pembayaran seragam dari wali murid ke pihak sekolah yang dikabarkan berlangsung hari ini.

"Memang acaranya ditunda. Dugaan kuat saya karena mereka mencurigai banyak media di depan sporthall," kata Kepala Perwakilan ORI DIY, Budhi Masturi, melalui keterangan tertulis, Senin (18/7/2022).

Budhi menjelaskan berdasarkan informasi dari masyarakat, ada pengumuman di grup wali murid yang mengatakan karena ada sesuatu hal maka untuk yang bayar seragam hari ini ditunda.

"Bunda, krn ada suatu hal utk yg mau bayar hari ini, dicansel dulu njih* nanti saya umumkan lg (emotikon)," kata Budhi, sambil melampirkan chat pengumuman dari sekolah.

Budhi menjelaskan berdasarkan informasi awal, pihak sekolah diduga menggunakan orang tua untuk penjualan seragam sekolah tersebut. Oleh sebab itu hari ini ORI ingin memastikannya dengan menggelar sidak.

"Diduga sekolah menggunakan orang tua. Maka kami sidak untuk memastikan," katanya.

Ditemui di lokasi, Asisten ORI DIY Chasidin mengungkapkan pihaknya mendapatkan informasi terkait dengan pemesanan dan pembayaran seragam. Kemudian ORI bergerak ke sekolah tersebut.

"Dapat informasi terkait dengan pemesanan dan pembayaran seragam. Tapi, kita klarifikasi tadi dikoordinir oleh orang tua. Bukan Komite, tapi orang tua murid di masing-masing kelas itu ditunjuk satu koordinator siapa yang mau memesan dengan mereka," jelasnya.

Dari klarifikasi tersebut, lanjut Chasidin, orang tua juga diperbolehkan membeli seragam di luar. Saat ini, semua keterangan tersebut masih didalami apakah ada campur tangan sekolah atau komite.

"Tapi kalau mau beli dari luar diperbolehkan. Kami akan dalami apakah ada turut campur dari sekolah atau tidak. Kalau ada peran dari sekolah atau Komite kan tidak boleh," jelasnya.

ORI, lanjut Chasidin, menemukan pada awal Juli lalu sekolah sempat koordinasi pengadaan seragam siswa ini. Tapi, hal itu urung mereka lanjutkan setelah ada Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

"Sebelum ini awalnya dikoordinir sekolah, tapi waktu itu ada Edaran dari Dinas. Juli ini disetop. Sempat dikoordinir sekolah dihentikan dan dikembalikan uangnya," katanya.

Di kesempatan yang sama, Kepala SMPN 1 Depok Sukendar mengungkapkan pengadaan seragam sekolah telah mereka serahkan kepada orang tua siswa. Meski pada 2 Juli lalu saat mengumpulkan orang tua, sekolah sempat mendapatkan titipan orang tua siswa untuk pengadaan seragam.

"Saya serahkan sepenuhnya kepada orang tua. Sudah ditindaklanjuti oleh orang tua. Jadi sekolah sudah lepas terkait dengan pengadaan seragam," kata Sukendar.

"Sudah koordinir orang tua. Tanggal 2 Juli kami mengumpulkan orang tua. Nah, itu kami menjelaskan tentang program sekolah. Kemudian ada juga orang tua yang menanyakan seragam itu. Terpancinglah ke sana. Saya sampaikan seragam itu menjadi tanggung jawab orang tua. Silakanlah untuk diadakan sendiri, toh baju putih-putih bisa beli di mana pun. Biru putih bisa di mana pun, Pramuka juga begitu kan," katanya.

Sedangkan terkait dengan seragam khusus, lanjut Sukendar, sekolah telah memberikan sampel dan spek bagi orang tua.

"Nah terkait dengan pakaian khusus sekolah ada batik ada pakaian training olahraga harus pesan sebelumnya. Baru ke arah sana, kemudian pada pesan-pesan, nah dalam proses pesan itu ada yang titip uang," jelasnya.

"Nitip dan sekolah belum ada seragam. Nah proses selanjutnya, uang titipannya itu kami kembalikan ke orang tua. Besarannya macam-macam ada 400, ada yang pengin beli pakaian khusus aja, training kemudian batik 468 ribu. Silakan orang tua yang mengadakan tadi. Sekolah hanya memberikan contoh. Batik seperti ini, training seperti ini," katanya.